

Judul : Cari Cara Tekan Defisit di APBN Transisi
Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-14

Cari Cara Tekan Defisit di APBN Transisi

Defisit lebar dalam APBN transisi Joko Widodo ke Prabowo Subianto dipertanyakan. Belanja negara disisir ulang untuk menekan defisit. Masih banyak belanja yang bisa diefisienkan untuk memberikan ruang fiskal baru.

JAKARTA, KOMPAS — Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 berlangsung kompleks. Target defisit dalam APBN pertama Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan pemerintahan saat ini berpotensi berubah akibat dibayangi utang negara dan aspirasi pemerintahan baru yang mesti diwadahi.

Sebelumnya, saat menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan penyusunan Rancangan APBN 2025, pemerintahan Joko Widodo

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

>> BACA JUGA:

Suharso Minta RAPBN 2025 Dikepras

Bappenas meminta Kemenkeu menurunkan target defisit jadi 1,5-1,8 persen dari PDB. [KOMPAS.ID](http://kompas.id)

klik.kompas.id/rapbn2025

Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat

Data per 30 April 2024



Sumber: Kementerian Keuangan, Profil Utang Pemerintah Pusat Edisi Mei 2024. Boleh dikutip Kompas/Avn

INFOGRAPHIC: GUNAWAN

Cari Cara Tekan Defisit

(Sambungan dari halaman 1)

lewat Kementerian Keuangan sudah menetapkan target defisit yang lebar di rentang 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB). Nyaris menyentuh batas aman 3 persen dari PDB.

Di tengah jalan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monodarta tiba-tiba mengusulkan angka defisit yang lebih rendah di 1,5-1,8 persen dari PDB. Defisit yang lebih rendah itu diyakini bisa memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menjabat per Oktober 2024.

Dalam rapat penyusunan awal APBN 2025 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepanjang pekan ini, masalah defisit dan utang negara pun menjadi isu yang paling alot dibahas. Khususnya, setelah Suharso mengusulkan target defisit yang berbeda dari rancangan awal.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Dolfie Othman Frederic Palit mengingatkan pemerintah bahwa utang negara saat ini sudah tinggi. Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 akan mencapai Rp 806,33 triliun, naik nyaris dua kali lipat dari utang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 434,29 triliun.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah yang mesti ditanggung dalam APBN pun sudah menduduki komponen pengeluaran tertinggi dalam belanja pemerintah pusat. Pada 2024, besarnya diproyeksikan Rp 497,3 triliun.

Menurut Dolfie, jika defisit APBN 2025 ditetapkan 2,45-2,82 persen, seperti usulan awal, setidaknya ada potensi tambahan utang Rp 600 triliun untuk menutup defisit tahun depan.

"Oleh karena itu, untuk RAPBN 2025 ini buatlah defisit yang rendah sebagai permulaan. Jangan sampai memasuki pemerintahan baru ini dibebani utang yang juga besar," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Tergantung postur belanja

Dalam rapat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit fiskal bisa dicoba ditekan lebih rendah, tetapi bergantung pada postur penerimaan dan belanja pemerintahan berikutnya. "Kalau (defisit) bisa lebih rendah, tentu kita akan coba lebih rendah. Tinggal masalah belanjanya. Seperti apa komposisinya itu tergantung pemerintahan berikutnya," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, sejak awal penyusunan KEM-PPKE, tim Prabowo sudah ikut dilibatkan. "Kami tanyakan ke *incoming government* mauanya seperti apa. Jadi, kami ini men-

coba menjadi wadah dari semua dinamika perubahan. Dari sisi politik, aspirasi pemerintahan baru, prioritas yang harus dijaga, sambil menjaga APBN tetap kredibel dan stabil," tutur Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, pada dasarnya risiko utang negara masih terkendali. Kondisi APBN, perekonomian, dan politik domestik memengaruhi peringkat utang Indonesia yang sampai saat ini terjaga positif dan stabil. Hal itu membuat surat utang Indonesia masih diminati investor dan risiko utang bergulir pun terhitung kecil.

Jatuh tempo utang pemerintah tahun depan didominasi surat berharga negara (SBN) Rp 705,5 triliun yang mayoritas dalam mata uang rupiah. Sementara utang dalam bentuk pinjaman bilateral, multilateral, dan komersial yang lebih berisiko membebani APBN hanya Rp 94,83 triliun.

Gerindra kaget

Suharso menyatakan, salah satu cara untuk menekan defisit tanpa menambah utang adalah dengan menyisir ulang belanja pemerintah. Menurut dia, masih banyak belanja yang bisa diefisienkan dan dirasionalkan untuk memberikan ruang fiskal bagi kabinet Prabowo.

Ada banyak pos belanja di pemerintahan saat ini yang (porsinya) bisa kita kurangi sedikit. Kira-kira kalau dibandingkan besaran PDB, berarti ada ruang Rp 230 triliun yang harus dirangsang. Ini tidak terlalu besar," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengatakan, pihaknya mengapresiasi adanya keinginan agar pemerintahan Prabowo ke depan tidak dibebani utang yang terlalu besar. Namun, keputusan terkait itu bergantung pada pemerintahan Jokowi saat ini.

"Kita mesti tahu dulu postur defisit versi Bappenas dan Kemenkeu itu seperti apa. Ruang fiskalnya bagaimana. Kami (Gerindra) juga kaget ada perubahan (mengenai usulan defisit itu)," katanya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faizal mempertanyakan defisit yang terlalu lebar di Rancangan APBN 2025. Sebab, dari sisi logika transisi pemerintahan, semestinya tidak ada tambahan program baru dari pemerintahan saat ini yang membebani defisit di APBN transisi.

Menurut dia, pemerintah saat ini cukup memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Prabowo. Hal itu juga yang dulu dilakukan saat masa transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014.

"Nanti kalau sudah bergantung pemerintahan, kalau (Prabowo) ingin menjalankan program pemerintahannya, itu bisa diubah lewat mekanisme APBN Perubahan," tuturnya. (AGE)